

**Evaluasi pelaksanaan perda no. 3 tahun 2002  
tentang pajak kendaraan bermotor dan kontribusinya  
terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Boyolali  
di kantor bersama samsat Boyolali**



**Tugas Akhir**

Diajukan guna melengkapi Tugas-tugas dan Persyaratan untuk  
mencapai gelar Ahli Madya pada Program D III Perpajakan

**Disusun oleh  
YUNI SUSILOWATI  
F 3402065**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2005**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Surakarta, Juli 2005

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing,

Dra. Evi Gantowati, Msi, Ak

## HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh Tim Penguji.

Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan.

Surakarta, Juli 2005

Tim penguji Tugas Akhir

1. Drs. Sri Hanggana, Msi, Ak  
Penguji

---

2. Dra. Evi Gantowati, Msi, Ak  
Dosen Pembimbing

---

## MOTTO

*\* Mengulang kesalahan dua kali adalah hal yang sangat bodoh.*

*\* Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh*

*berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'*

*(Q.S Al Baqarah : 45)*

*\* Berdoa dan berusaha adalah kunci keberhasilan*

*\* Keberanian, kesabaran, dan keikhlasan akan membuat kita menjadi kuat dalam menghadapi*

*segala yang terjadi dalam hidup.*

*\* Mengambil hikmah dari setiap kegagalan adalah jauh lebih berharga dari pada terus meratapi*

*dan menangisi kegagalan itu*

*\* Awalilah hari-harimu dengan senyum, karena dengan senyum akan menjadikan harimu jauh*

*lebih indah*

*\* Belajarlah untuk berkata dan berbuat jujur meski kadang kejujuran itu sangat menyakitkan*

*\* Jangan pernah membohongi hati nuranimu, karena sesungguhnya kata hati adalah hakim yang*

*paling adil*

*\* Jangan pernah takut untuk mencoba, karena kita tidak akan pernah tau seberapa besar*

*kemampuan kita*

*\* Kesuksesan tidak pernah datang pada orang yang malas, tapi datang pada orang yang gigih dan*

*sungguh-sungguh dalam berusaha*

## PERSEMBAHAN

*Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada :*

- ❖ *Bapak yang ada di surga, aku akan mencoba untuk penuhi harapanmu dan menjadi yang terbaik*
- ❖ *Mamiku sayang trima kasih atas kasih sayangmu dan jerih payahmu untuk memberi aku yang terbaik*
- ❖ *Kakakku trima kasih atas dukungannya*
- ❖ *Adik-adikku (anang and inok) kalian membuat aku untuk terus berharap*
- ❖ *Seseorang yang “membuat indah hariku” Thanks for your love and understand me*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*
- ❖ *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan judul : “EVALUASI PELAKSANAAN PERDA NO. 3 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BOYOLALI DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BOYOLALI”.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga wajar kiranya jika dalam penulisan ini banyak terdapat kekurangan.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari bukanlah atas usaha penulis semata, namun melibatkan banyak pihak, baik perorangan maupun Instansi yang membantu penulis dalam pencarian data, baik secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan penulisan tugas akhir ini.

Untuk itulah pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Salamah Wahyuni, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, Msi, Ak selaku Ketua Program D III Perpajakan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademis penulis di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Ibu Dra. Evi Gantowati, Msi, Ak selaku Pembimbing tugas akhir penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Kepala Kantor Bersama SAMSAT Boyolali atas ijin untuk mengadakan Praktek Kerja Lapangan/ Magang.
6. Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali atas ijin untuk mengadakan penelitian.
7. Bapak Djoko Harsono, SH atas waktu luangnya dan bimbingannya.
8. Segenap karyawan Kantor Bersama SAMSAT Boyolali atas segala keramah tamahannya.
9. Keluarga Bapak Bandi atas tempatnya selama magang dan penelitian. Trima kasih...trima kasih....dan trima kasih banget.
10. Mas “Dedy” atas kesabaran, pengertian, kesabaran dan segala yang tlah kamu berikan selama ini sangat berarti buat aku.....thanks ya Mas....
11. Hunik makasiiiiih...banget ya untuk bantuannya. Kata trima kasih mungkin ga’ cukup untuk semua yang udah kamu berikan buat aku. Tanpa bantuan, dorongan dan semangatmu mungkin aku ga’ akan sekuat ini. Thanks for your advise and keep our friendship.
12. “Te Be” kamu adalah temen sekaligus sahabat yang baiiiiiik banget...thanks ya..Be..untuk semua kebaikan, pertolongan dan dukunganmu selama ini...trima

kasih untuk tumpangnya...ya...makasih....makasi...dan makasih banget...keep our friendship ya....

13. Buat “Ge Es” sorry ya...gara-gara aku komputermu rusak...trima kasih udah minjemen aku.
14. “Na Na” thanks ya na....udah ngetikne aku sampai subuh. Sorry lho...buat Nila ojo lali lho...main kerumah kita kan tetangga.....
15. Temen-temen pajak “A” 02 atas kebersamaannya selama ini. Kalian adalah temen-temen yang kompak.
16. Semua orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam kelancaran tugas akhir ini.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sebagai balasan atas segala budi baik yang telah dilakukan. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surakarta, Juli 2005

Penulis



**DAFTAR ISI**

	Halaman
ABSTRAKSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I GAMBARAN UMUM KANTOR BERSAMA SAMSAT	
BOYOLALI	
A. Sejarah Berdirinya Kantor Bersama SAMSAT .....	1
B. Keadaan Umum Kantor Bersama SAMSAT Boyolali .....	2
C. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Bersama SAMSAT	
Boyolali.....	5
D. Mekanisme Kerja Kantor Bersama SAMSAT Boyolali .....	7
E. Latar Belakang Masalah .....	9
F. Rumusan Masalah.....	12
G. Tujuan .....	12
H. Manfaat .....	12

BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Pajak Daerah .....	14
2. Pajak Kendaraan Bermotor .....	15
3. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor.....	15
4. Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor .....	16
5. Pengecualian Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	16
6. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	17
7. Tarif Pajak Kendaraan .....	18
8. Besarnya pokok PKB .....	18
9. Tempat dan Kewenangan pemungutan PKB .....	18
10. Masa pajak dan saat terutang pajak.....	19
11. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB).....	19
12. Sanksi Administrasi .....	20
B. Evaluasi pelaksanaan pungutan Pajak kendaraan Bermotor	
Di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali.....	20
1. Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....	20
2. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor .....	36
3. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi .....	41
4. Pengurangan, Keringanan dan pembebasan pajak .....	43
5. Keberatan dan Banding.....	44

6. Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak .....	45
7. Kadaluwarsa.....	46
C. Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaran Bermotor (PKB)	
Di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali.....	48
D. Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali.....	49
BAB III TEMUAN .....	53
A. Kelebihan .....	53
B. Kelemahan.....	53
BAB IV REKOMENDASI.....	55
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Laporan penetapan PKB di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali	
	tahun anggaran 2000 s/d 2004 .....	37
Tabel II.2	Tunggakan Kendaraan Bermotor belum PU Bulan Maret 2005....	38
Tabel II.3	Laporan pengiriman Super KPKB Bulan Juni 2005 .....	40
Tabel II.4	Efektifitas penerimaan PKB Di SAMSAT Boyolali tahun	
	anggaran 2000 s/d 2004 .....	48
Tabel II.5	Kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD bagi hasil pajak di	
	Kabupaten Boyolali tahun 2000 s/d 2004 .....	50
Tabel II.6	Kontribusi penerimaan PKB terhadap APBD di Kabupaten	
	Boyolali tahun 2000 s/d 2004 .....	51

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Konfigurasi dan mekanisme komputerisasi SAMSAT ..... 8

Gambar 2.1 Bagan alir bagian pengambilan formulir ..... 24

Gambar 2.2 Bagan alir bagian pendaftaran ..... 25

Gambar 2.3 Bagan alir bagian pendataan ..... 26

Gambar 2.4 Bagan alir bagian penetapan ..... 27

Gambar 2.5 Bagan alir bagian pembayaran ..... 28

Gambar 2.6 Bagan alir bagian distribusi ..... 29

**BAB I**

**GAMBARAN UMUM**

**KANTOR BERSAMA SAMSAT BOYOLALI**

**A. Sejarah Berdirinya Kantor Bersama SAMSAT**

Sebelum tahun 1977 pelaksanaan pembayaran PKB masih kurang efektif, bertele-tele dan dengan birokrasi yang sulit. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pembayaran PKB dan penerbitan STNK yang dilakukan di tempat yang berbeda.

Pembayaran PKB dilakukan di kantor pos dan STNK diterbitkan oleh POLRI setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran dari kantor pos, dan masih menunggu dalam jangka waktu yang lama. Oleh sebab itu, masyarakat sebagai wajib pajak merasa enggan untuk melakukan pembayaran pajak karena mereka merasa direpotkan. Akibatnya, banyak tunggakan pajak yang tidak dibayar. Dengan demikian, penerimaan PKB menjadi tidak optimal dan tidak efektif karena penerimaan PKB masih dibawah target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka pada tanggal 28 Desember 1976 diterbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan (Menhankam), Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : Kep.1693/MK/12/1976 tentang “Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor”. Keputusan tersebut bermaksud mengatur adanya penyederhanan PKB/BBNKB, SWDKLLJ, yang dikaitkan dengan pengurusan STNK yang dilakukan dalam suatu Kantor Bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap). Dengan adanya keputusan tersebut, menjadi dasar berdirinya SAMSAT di masing-masing Kabupaten/ Kota. Kantor Bersama SAMSAT terdiri dari 3 (tiga) unsur petugas yaitu : Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD), POLRI dan Jasa Raharja. Ketiga unsur tersebut bekerjasama dalam satu <sup>tujuan</sup> guna mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik <sup>1</sup> Kendaraan Bermotor.

## B. Keadaan Umum Kantor Bersama SAMSAT Boyolali

1. Visi Kantor Bersama SAMSAT Boyolali adalah Pelayanan prima kepada masyarakat
2. Misi Kantor Bersama SAMSAT Boyolali adalah :
  - a. Peningkatan kualitas kinerja SAMSAT
    - 1). Perumusan program kerja/ kegiatan Tim Pembina SAMSAT Daerah yang dapat dipedomani oleh aparat SAMSAT.
    - 2). SDM yang profesional, bersih dan berwibawa.
    - 3). Prosedur dan mekanisme dibuat dan diatur untuk memberikan kemudahan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

- 4). Sarana dan prasarana direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Harus baku, bermutu, ekonomis dan terpakai baik untuk peningkatan pelayanan masyarakat sehingga tidak menimbulkan keluhan dan sorotan masyarakat.
- 5). Menertibkan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum
- 6). Meningkatkan intensitas penyuluhan Peraturan Daerah tentang PKB dan BBNKB dengan mengikut sertakan 3 (tiga) instansi terkait dalam SAMSAT agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban sebagai subjek pajak.

b. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Kantor Bersama SAMSAT Boyolali selalu berpedoman pada 6 (enam) asas pelayanan yaitu :

- 1).Aman yaitu adanya rasa kepastian akan produk yang diberikan dan jaminan perlindungan oleh aparat SAMSAT kepada wajib pajak.
- 2).Cepat yaitu adanya kepastian waktu pengurusan. Pembayaran PKB dilakukan dengan menggunakan sistem *one day service*.
- 3).Murah yaitu pembebanan biaya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan tidak ada pungutan lain diluar ketentuan.
- 4).Mudah yaitu pelayanan dilaksanakan dengan dilandasi prosedur yang jelas.
- 5).Transparan yaitu prosedur pengurusan dan besarnya biaya diberitahukan kepada wajib pajak secara jelas dan terbuka
- 6).Kepuasan yaitu pelayanan dilaksanakan secara profesional sehingga petugas maupun wajib pajak merasa puas.

### 3. Strategi Kantor Bersama SAMSAT Boyolali.

#### a. Profesionalisme SDM

- 1). Pemberdayaan karyawan dengan menempatkan karyawan pada posisi yang tepat dan proporsional sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- 2). Meningkatkan disiplin kerja.

#### b. Sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai. Pelayanan dengan sistem komputerisasi sepenuhnya mendorong pelaksanaan pelayanan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Aparat yang bersih dan berwibawa.

- 1). Keteladanan dari unsur pimpinan.
- 2). Peningkatan disiplin kerja bagi karyawan.
- 3). Adanya keterbukaan dalam melakukan pelayanan.
- 4). Adanya transparansi masalah biaya.
- 5). Adanya sanksi bagi aparat yang melakukan pelanggaran.
- 6). Perlu adanya peningkatan kesejahteraan bagi karyawan.

#### c. Tugas Kantor Bersama SAMSAT Boyolali.

Tugas Kantor Bersama SAMSAT Boyolali adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah di bidang pendapatan daerah khususnya PKB dan BBNKB di Kabupaten Boyolali.

#### d. Fungsi Kantor Bersama SAMSAT Boyolali.



- 1). Penyelenggaraan perumusan teknis yang telah digariskan oleh kepala dinas.
- 2). Pelaksanaan segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan Daerah yang telah digariskan oleh kepala dinas
- 3). Ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha.
- 4). Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- 5). Penyusunan data untuk pembuatan laporan.

### C. Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Kantor Bersama SAMSAT Boyolali

1. Kegiatan pelayanan.
  - a. Melayani masyarakat dalam pembayaran PKB dan BBNKB.
  - b. Mengirim surat pemberitahuan kewajiban pemilik kendaraan bermotor menjelang berakhirnya masa pajak kendaraan bermotor
  - c. Mengirim surat teguran/peringatan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan pembayaran pajak.
  - d. Melayani permintaan surat keterangan fiskal daerah dan surat fiskal antar daerah.
  - e. Membuat surat pengantar atas permohonan keberatan wajib pajak terhadap denda sanksi administrasi.

2. Kegiatan operasional.
  - a. Mendukung pelaksanaan pendataan kendaraan bermotor dalam rangka:
    - 1.) Meng up to date data kendaraan bermotor.
    - 2.) Mengisi kartu wajib pajak sebagai pengendali pembayaran pajak.
    - 3.) Peningkatan kualitas data induk.
    - 4.) Penyempurnaan program komputer dalam aplikasi pengolahan data.
  - b. Membantu pemeriksaan setempat atas tunggakan PKB dan BBNKB dengan sistem pintu ke pintu
  - c. Mendukung pelaksanaan penyuluhan kepada wajib pajak atau warga masyarakat tentang PKB dan BBNKB
3. Kegiatan pelaporan dan pengawasan.
  - a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan personil, materiil dan administrasi
  - b. Menindak lanjuti hasil pemeriksaan oleh instansi fungsional atau intern dinas
  - c. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan secara berkala.
4. Koordinasi
  - a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
  - b. Mengikuti rapat dalam rangka pembinaan aparat oleh Tim Pembina SAMSAT tingkat propinsi.

#### **D. Mekanisme Kerja Kantor Bersama SAMSAT Boyolali**

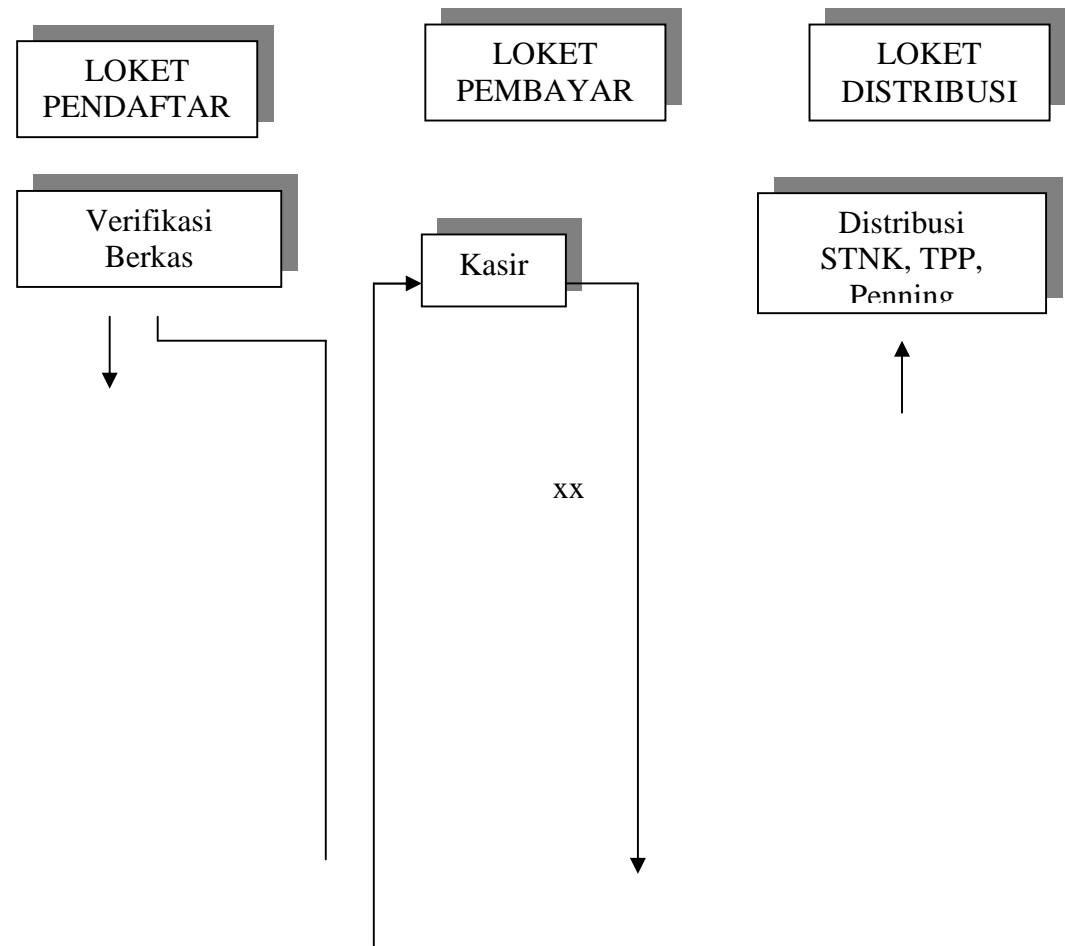
Ketiga instansi yang berada dalam Kantor Bersama SAMSAT (UPPD, POLRI dan Jasa Raharja) tidak terkait dalam suatu struktur organisasi, namun sesuai

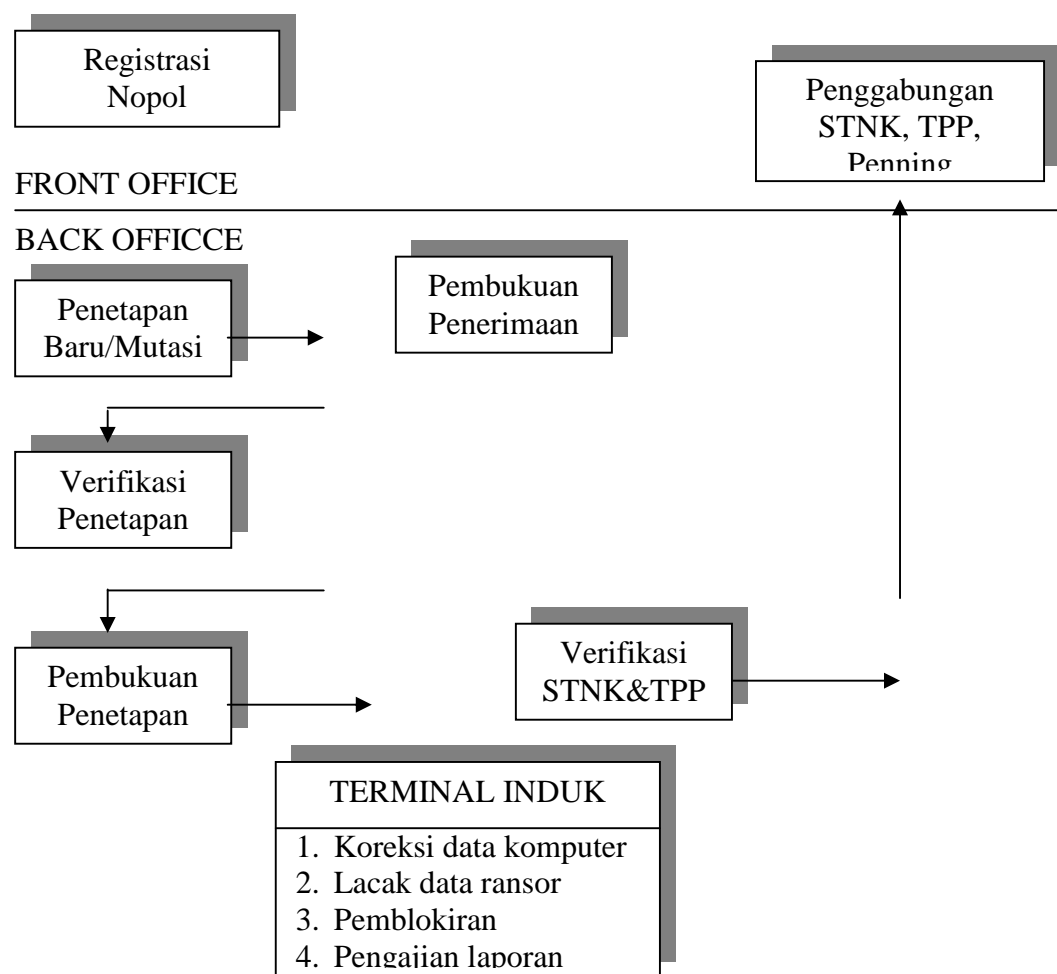
dengan fungsi dan tugasnya terkait dalam suatu mekanisme kerja. Sebagaimana tersurat dalam Petunjuk Pelaksanaan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direksi (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor: POL.JUKLAK/38/X/1988; Nomor : JUKLAK/01/JR/X/1988; Nomor : 975-901 Tanggal 4 Oktober 1988 yang diperbarui dengan Nomor: POLJUKLAK/09/VI/1994; Nomor: JUKLAK/01/JR VI/1994; Nomor: 973/1818/PUOD Tanggal 1 Juni 1994 tentang Tata Laksana Pendaftaran Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada Kantor Bersama SAMSAT, maka mekanisme kerja pada Kantor Bersama SAMSAT Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mendaftarkan kendaraannya dengan menggunakan Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan surat-surat lainnya di loket pendaftaran.
2. Berkas-berkas pendaftaran diverifikasi.
3. Dari hasil verifikasi kemudian dilakukan penetapan besarnya pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar.
4. Wajib Pajak melakukan pembayaran PKB di loket pembayaran sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.
5. Wajib Pajak dapat mengambil STNK, TPP, Penning, dan TNKB pada loket distribusi.

Mekanisme kerja pada Kantor Bersama SAMSAT Boyolali dapat dilihat pada bagan berikut ini :

**Gambar 1.1**  
**KONFIGURASI DAN**  
**MEKANISME KOMPUTERISASI SAMSAT**





#### E. Latar Belakang Masalah

Dengan diundangkannya UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur pemerintahan dan menjalankan pembangunan daerahnya sendiri secara efektif dan efisien. Pengelolaan kekayaan daerah perlu ditingkatkan guna pembiayaan pembangunan. Optimalisasi penerimaan terutama dari sektor pajak perlu diupayakan, karena pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai mana kita ketahui pajak merupakan suatu pungutan/iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan jasa (kontraprestasi) secara langsung yang ditujukan dan digunakan untuk membiayai keperluan umum (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH). Khususnya pajak kendaraan bermotor peningkatan penerimaan dapat terwujud apabila tercipta kerjasama yang baik antara instansi pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak, serta didukung adanya peraturan-peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berdasarkan UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak Daerah Propinsi yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui instansi yang berada dalam Kantor

Bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap). Instansi yang terdiri dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD), POLRI, dan Jasa Raharja ini mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan menggali potensi pajak propinsi yang ada di Daerah Kabupaten/Kota yang salah satu diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Mengingat perkembangan kemajuan teknologi yang sangat cepat dan tingkat mobilitas masyarakat yang begitu cepat, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan kendaraan bermotor juga semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat terlihat dari adanya peningkatan jumlah obyek kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Dari data yang diperoleh penulis dari Kantor Bersama SAMSAT Boyolali, selama lima tahun terakhir jumlah obyek kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang cukup pesat. Tahun 2000 obyek PKB 49.154 unit; tahun 2001 72.253 unit; tahun 2002 80.729 unit; tahun 2003 91.109 unit dan tahun 2004 103.796 unit.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah menganggap bahwa Perda Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang. Berhubungan dengan itu, untuk lebih mengoptimalkan penerimaan PKB yang ada pada setiap daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah Jawa Tengah menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2002 yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya pembaruan Perda tersebut diharapkan penerimaan PKB menjadi lebih optimal. Selama lima tahun terakhir penerimaan PKB di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali terus mengalami kenaikan. Dengan Tahun dasar Tahun 2000, pada tahun 2001 mengalami kenaikan sebesar 98,2%; tahun 2002 162,36%; tahun 2003 235,75% dan pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 359,74%. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 penerimaan PKB mengalami kenaikan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya pembaruan dalam pemungutan PKB yaitu dengan diterbitkannya Perda No. 3 Tahun 2002.

Dari sedikit gambaran tersebut diatas maka penulis ingin menjabarkan lebih luas mengenai pelaksanaan Perda No.3 Tahun 2002 di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali, yang didukung dengan data yang diperoleh penulis dari Kantor Bersama SAMSAT Boyolali. Oleh sebab itu, dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mengambil judul “ **EVALUASI PELAKSANAAN PERDA NO.3 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BOYOLALI** “

Judul tersebut diambil dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Perda No.3 Th 2002 tersebut di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali, serta untuk mengetahui sejauh mana dampak adanya Perda tersebut terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dan untuk mengetahui besarnya kontribusi yang di berikan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali.

#### **F. Rumusan Masalah**

Setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan disekitar pelaksanaan Perda No.3 Th 2002 yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Perda No.3 Th 2002 di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali?
2. Bagaimana efektivitas penerimaan PKB di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali?
3. Bagaimana kontribusi penerimaan PKB di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali terhadap PAD Kab.Boyolali?

#### **G. Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perda No.3 Th 2002 yang dilakukan di SAMSAT Boyolali.
2. Untuk mengetahui efektivitas Penerimaan PKB di SAMSAT Boyolali.
3. Untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali.

#### **H. Manfaat**

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi obyek penelitian (Kantor Bersama SAMSAT Boyolali)

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam menentukan langkah kedepan baik dalam perencanaan kegiatan maupun dalam pelaksanaan pemungutan PKB sehingga dapat meningkatkan penerimaan PKB.

2. Bagi Pembaca

**Sebagai bahan bacaan yang dapat digunakan untuk referensi penelitian berikutnya.**

## BAB II

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Adapun jenis Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

##### a. Pajak Daerah Tingkat I (Pajak Daerah Propinsi).

- 1). Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- 2). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- 3). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 4). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

##### b. Pajak Daerah Tingkat II (Pajak Daerah Kabupaten/Kota)

- 1). Pajak Hotel.
- 2). Pajak Restoran.
- 3). Pajak Hiburan.

- 4). Pajak Reklame
- 5). Pajak Penerangan Jalan.
- 6). Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
- 7). Pajak Parkir

## 2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak propinsi yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui instansi yang berada dalam Kantor Bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap), dengan sistem bagi hasil pajak.

Berdasarkan perda No. 3 Tahun 2002 pasal 1 yang dimaksud dengan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

## 3. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

- a. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



- b. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
  - c. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 75 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2002.
  - d. Keutusan Kepala Dipenda Prop.Jateng No. 973/5522/2002 Tentang Petunjuk Teknis Perda No. 3 Tahun 2002.
4. Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

*Objek Pajak Kendaraan Bermotor*

Berdasarkan pasal 3 Perda No. 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, objek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraa bermotor yang terdaftar di daerah.

*Subjek Pajak Kendaraan Bermotor*

**Berdasarkan pasal 5 Perda No. 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.**

5. Pengecualian Objek Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan pasal 4 Perda No. 3 Tahun 2002 dikecualikan dari objek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga-Lembaga Internasional dengan asas timbal balik.
- c. Pabrikasi atau milik importir yang semata-mata tersedia dipamerkan dan dijual

- d. Orang pribadi atau badan yang digunakan semata-mata untuk pemadam kebakaran.
  - e. Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita.
6. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dasar pengenaan PKB dihitung berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

#### **NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR**

Diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur.

Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jualnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor :

- a. Isi silinder dan atau satuan daya.
- b. Penggunaan kendaraan bermotor.
- c. Jenis kendaraan bermotor.
- d. Merek kendaraan bermotor.
- e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor.
- f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan
- g. Negara pembuat kendaraan bermotor.
- h. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

## BOBOT

Dihitung berdasarkan faktor-faktor :

- a. Tekanan gandar.
- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor.
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor

### 7. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pasal 7 Perda No. 3 Tahun 2002 tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- b. 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- c. 0,5 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

### 8. Besarnya pokok PKB yang terutang.

Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayar dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB.

Rumus :

$$\text{Dasar pengenaan PKB} = \text{NJKB} \times \text{Bobot}$$

$$\begin{aligned} \text{Pokok PKB/ pajak yang harus dibayar} \\ = \text{Tarif PKB} \times \text{Dasar pengenaan PKB} \end{aligned}$$

### 9. Tempat dan Kewenangan Pemungutan PKB.

Pajak Kendaraan Bermotor dipungut di tempat kendaraan bermotor didaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur. Sedangkan kewenangan pemungutan PKB ditetapkan oleh Gubernur. Apabila terjadi pemindahan

kendaraan bermotor dari daerah lain ke daerah, maka wajib pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan pajak dari daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

10. Masa Pajak dan Saat terutang Pajak.

- a. Masa PKB adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai saat didaftarkan.
- b. Kewajiban pajak yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.

11. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB)

Berdasarkan pasal 11 Perda No. 3 Tahun 2002 dijelaskan bahwa :

- a. Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPPKB
- b. SPPKB disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya :
  - 1). 30 hari sejak saat penyerahan dan atau kepemilikan untuk kendaraan bermotor baru.
  - 2). Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak untuk kendaraan bermotor bukan baru.
  - 3). 30 hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi kendaraan dari luar daerah.
- c. SPPKB harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

- d. Apabila terjadi perubahan kendaraan bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPPKB.

#### 12. Sanksi Administrasi

- a. Apabila SPPKB disampaikan terlambat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % dari pokok pajak setiap bulan keterlambatan.
- b. Apabila penyampaian SPPKB tidak dilakukan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25 % dari pokok pajak, ditambah bunga sebesar 2 % dihitung dari pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

### **B. Evaluasi Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Boyolali.**

#### **1. Tata Cara Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor.**

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali, dengan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) selama 5 (lima) tahun. PKB ditentukan pada saat kendaraan bermotor didaftarkan di Kantor Bersama SAMSAT untuk masa pajak selama 12 (dua belas) bulan. Pembayaran PKB di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan pembayaran, wajib pajak mengambil Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) yang sudah berisi mengenai

nama pemilik dan obyek kendaraan bermotor di bagian penyediaan formulir dengan menyerahkan berkas-berkas antara lain:

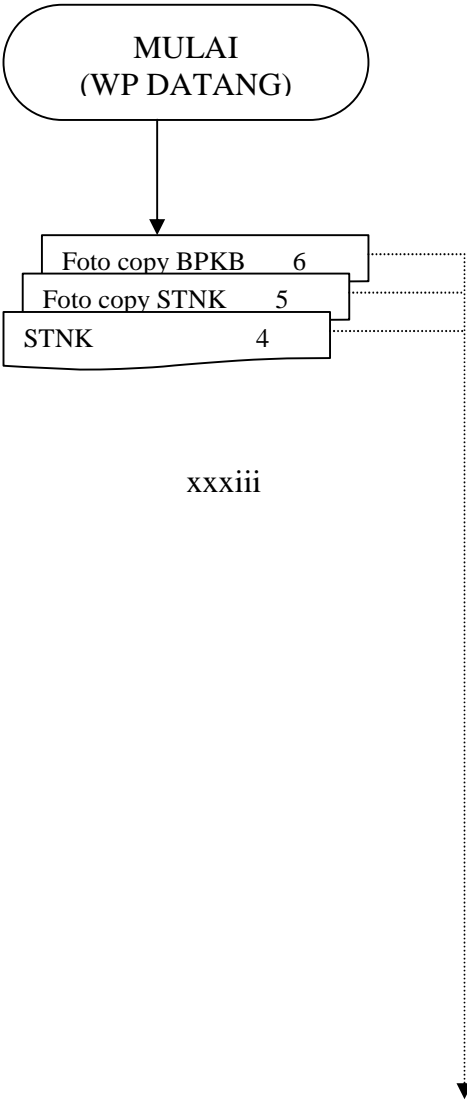
- 1). Faktur dan atau kuitansi jual beli untuk kendaraan bermotor yang baru dimiliki/dikuasai dan PIB untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) baru.
- 2). Formulir A atau B bagi kendaraan yang diimpor atau dibeli dari keduataan negara asing atau badan-badan internasional.
- 3). Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau Tanda jati diri yang sah.
- 4). BPKB dan STNK.
- 5). Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) bagi kendaraan mutasi.
- 6). Surat keterangan atau rekomendasi dari bengkel karoseri bagi kendaraan yang mengalami rubah bentuk.
- 7). Surat keterangan atau rekomendasi dari DLLAJ bagi rubah status atau ganti fungsi.
- 8). Salinan atau foto copy akte pendirian dan keterangan domisili bagi badan hukum.
- 9). Lelang Negara/ lelang atas perintah pengadilan : Risalah lelang dan kuitansi bagi kendaraan yang perolehannya berasal dari lelang negara atau lelang atas perintah pengadilan
- 10). Kuitansi dan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah untuk jual beli kendaraan dari luar UPPD.
- 11). Ganti mesin : faktur atau kuitansi pembelian mesin untuk kendaraan ganti mesin.

- b. SPPKB tersebut kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak dan diserahkan kembali ke bagian pendaftaran bersama berkas-berkas yang lain untuk diteliti kelengkapan persyaratannya dan dicatat oleh bagian pendaftaran.
- c. Setelah diteliti dan dicatat oleh bagian pendaftaran, kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan ke bagian input atau pendataan untuk didata di dalam komputer.
- d. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan pada bagian penetapan untuk dihitung besarnya pajak yang harus dibayar. Bagian penetapan meng print out notice pajak atau nota pembayaran pajak yang disebut Surat Ketetapan Tanda Bukti Pembayaran PKB/ BBNKB dan SWDKLLJR.
- e. Notice pajak dipisah-pisahkan dan dimasukkan ke map sesuai dengan berkasnya. Misalnya: notice pajak AD 3000 CD harus masuk berkas AD 3000 CD juga.
- f. Notice pajak yang sudah dimasukkan ke dalam berkas diceking oleh Kepala Seksi PKB/BBNKB untuk dicek penetapannya.
- g. Notice pajak dan berkas-berkas diserahkan ke bagian pembayaran. Wajib pajak dipanggil untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang sudah ditetapkan, harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (duabelas) bulan. Setelah dibayar notice pajak dimasukkan ke register untuk dilakukan pengesahan.
- h. Setelah disyahkan berkas-berkas tersebut diserahkan ke bagian distribusi untuk pengambilan STNK. STNK yang sudah disyahkan bersama dengan notice pajak diserahkan ke Wajib Pajak. Sedangkan berkas-berkas yang lain

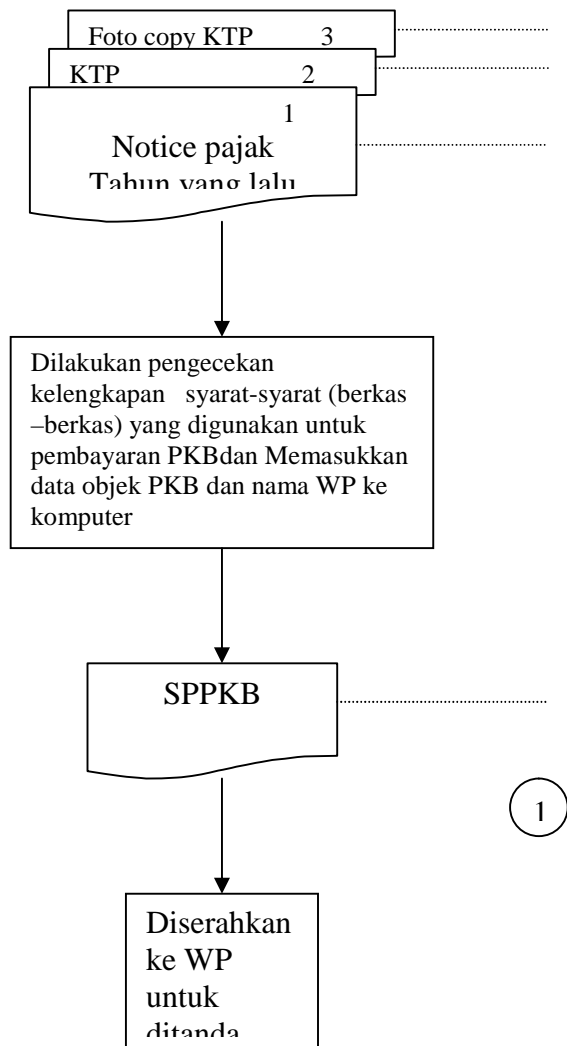
dimasukkan dalam arsip SAMSAT sesuai dengan nomor depan dari nomor kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Proses pelaksanaan pembayaran PKB untuk pengesahan tiap tahun dapat dilihat pada bagan alir berikut :

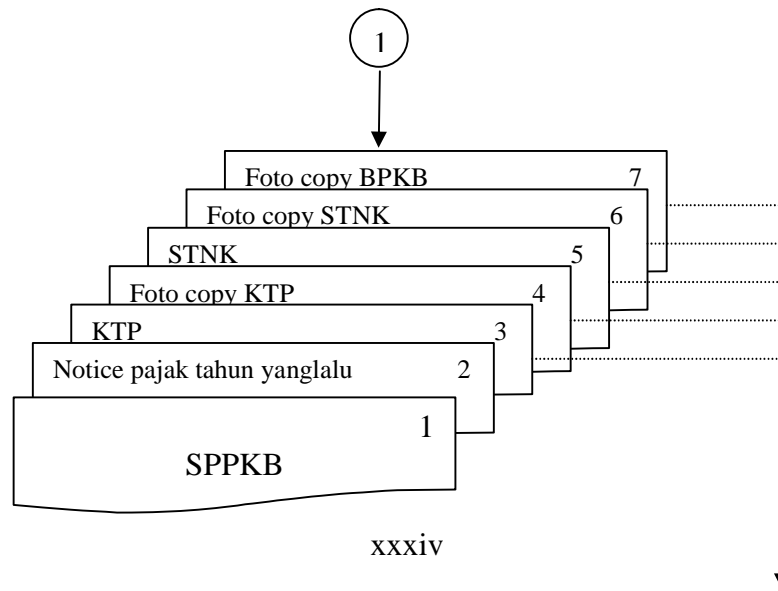
Gambar 2.1  
BAGIAN PENGAMBILAN FORMULIR

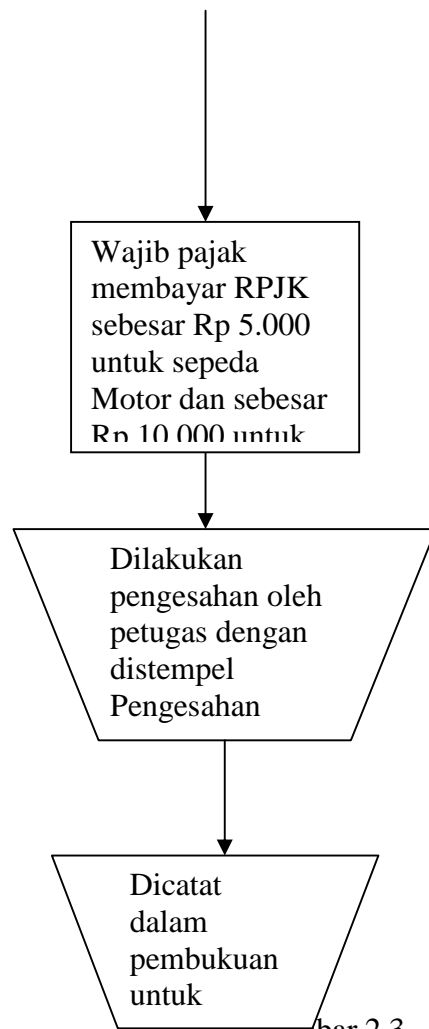




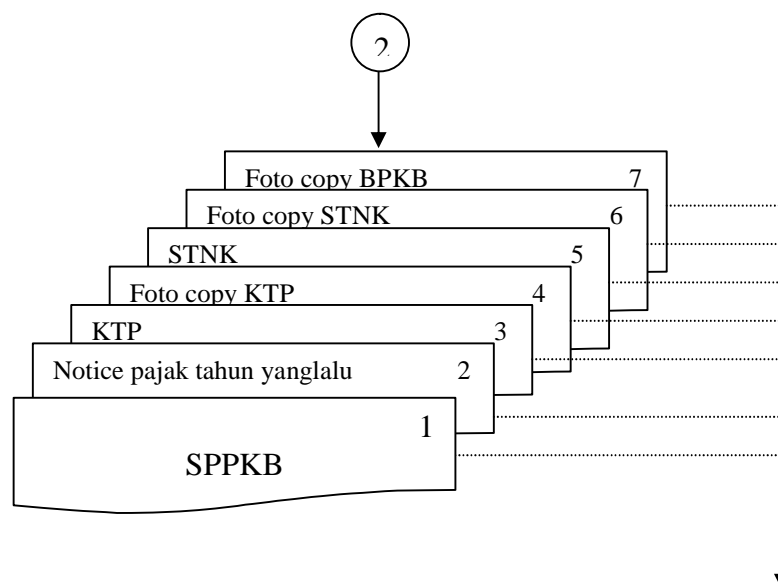


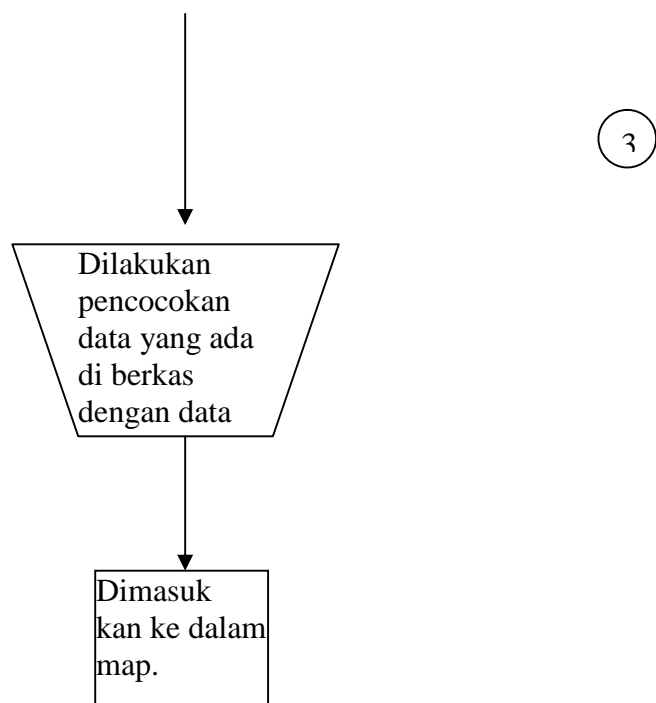
Gambar 2.2  
BAGIAN PENDAFTARAN



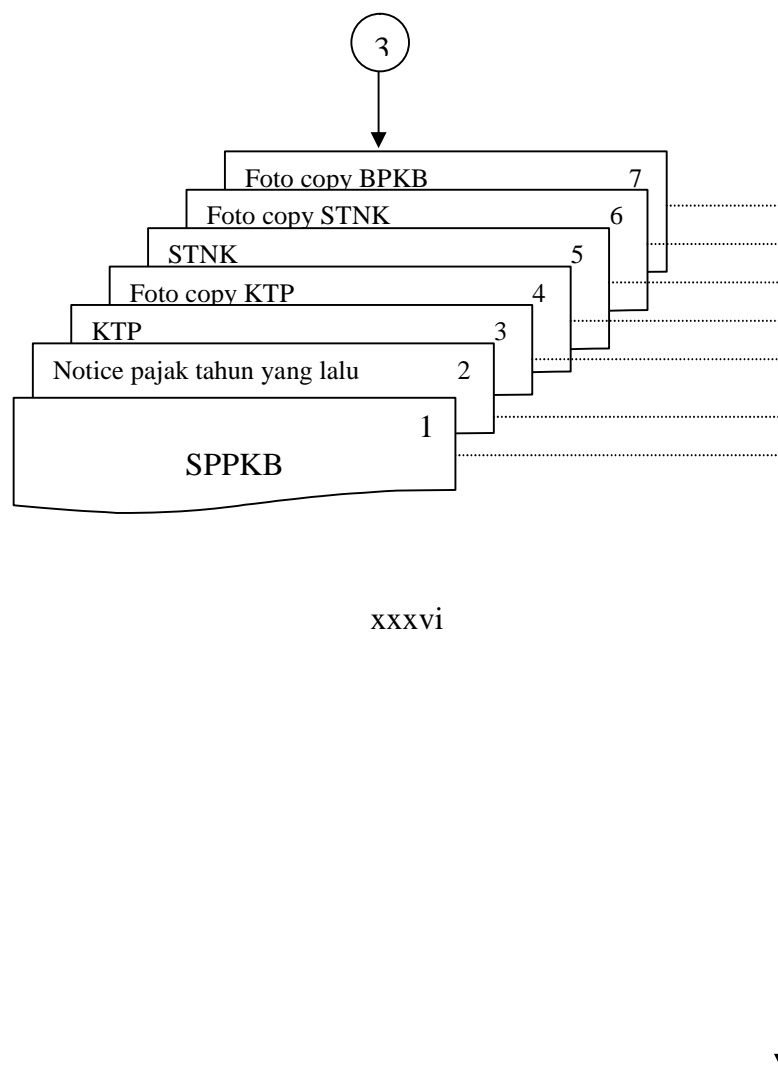


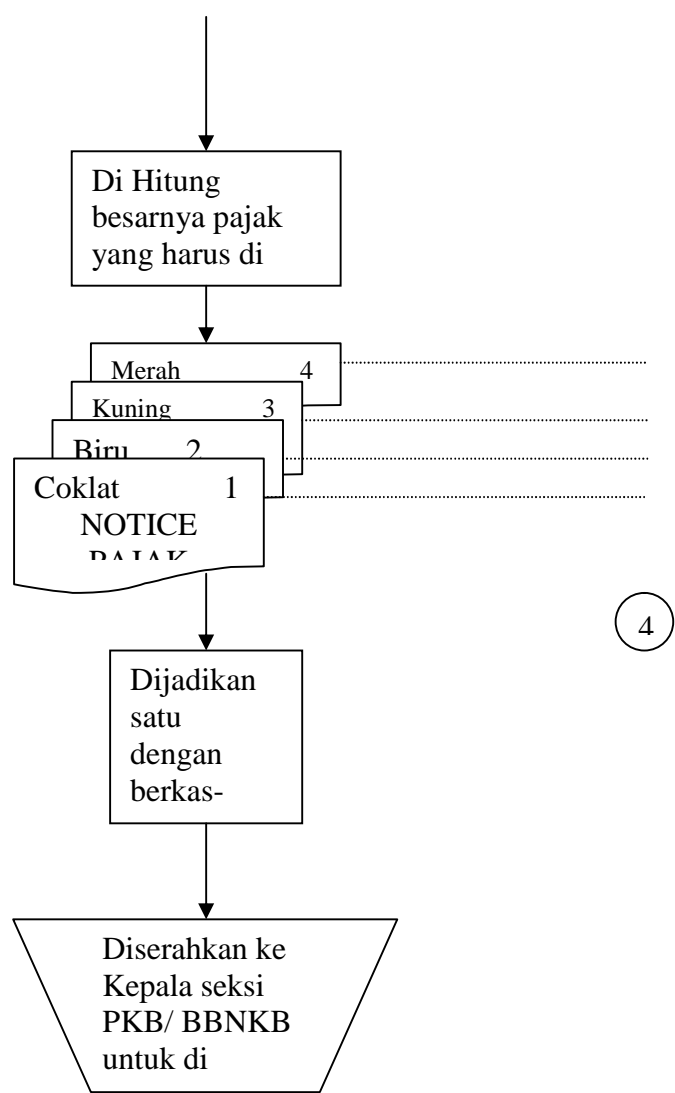
**Gambar 2.3**  
**BAGIAN PENDATAAN**





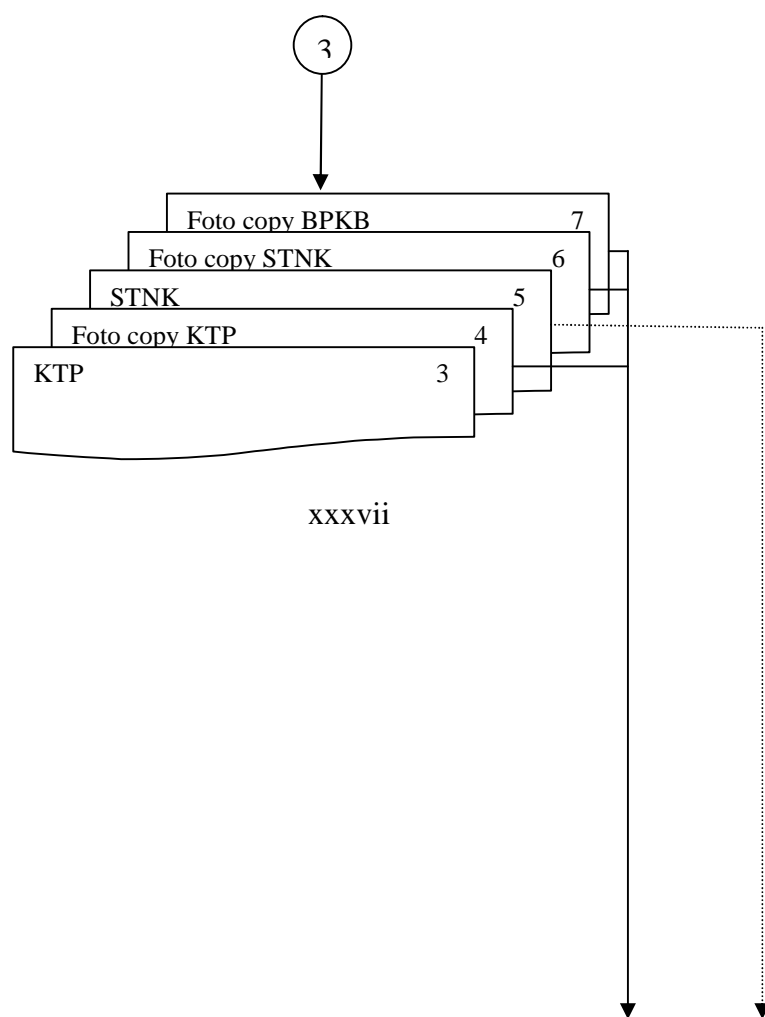
Gambar 2.4  
BAGIAN PENETAPAN

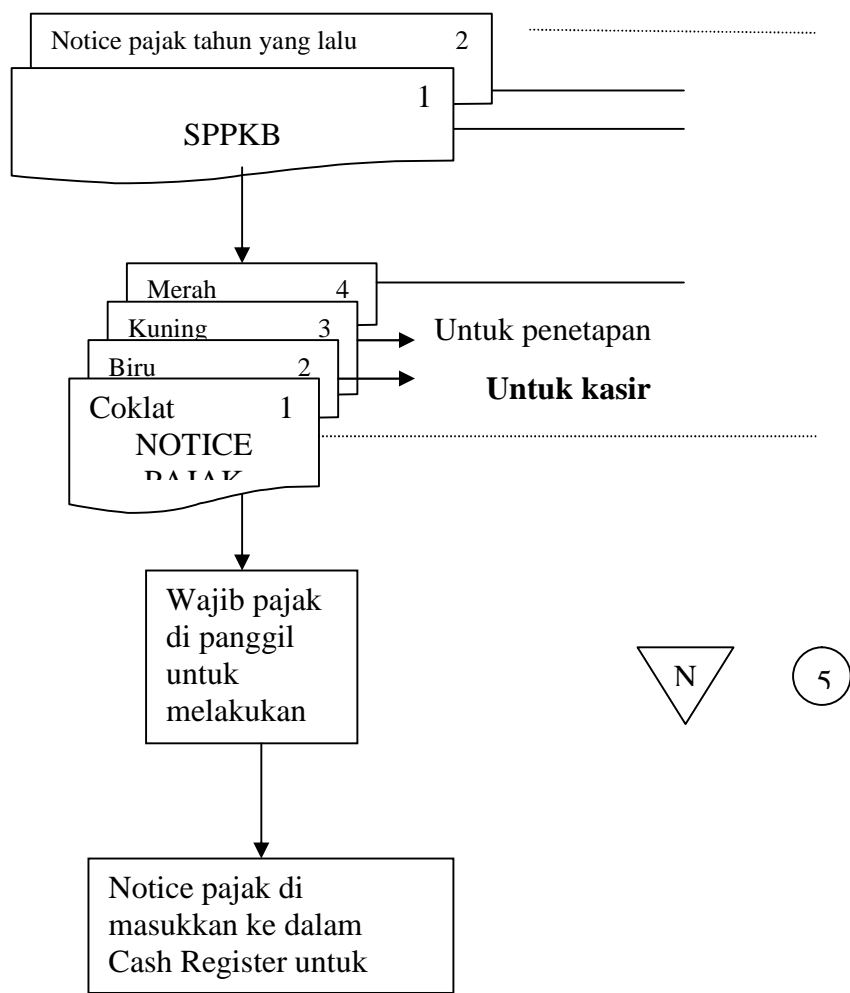




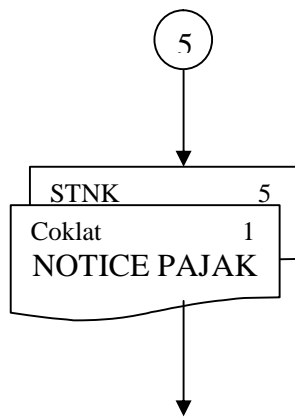
Gamar 2.5

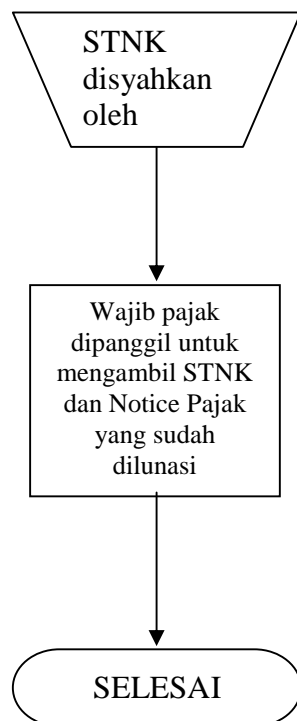
### BAGIAN PEMBAYARAN





Gambar 2.6  
BAGIAN DISTRIBUSI





Contoh wajib pajak

1. Nama pemilik : Jamilatun

**Alamat : Tinawas, Rembun, NGS, BYL**

Merk / type /Jenis : Honda/ C100/ Sepeda Motor

Th Pembuatan/Perakitan : 1997

Isi Silinder/Warna : 00100CC/HITAM

Nomor Rangka /NIK : MH1NFG00VVK68992

Nomor Mesin	: NFE1688904
Nomor BPKB	: 701077751
Usai tanggal STNK	: 12/06/2007
Usai tanggal pajak	: 12/06/2005
Ditetapkan	: 16/06/2005
Dibayar	: 16/06/2005

Karena terlambat membayar, maka Ny. Jamilatun dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % dari pokok PKB dan sanksi administrasi untuk SW jasa raharja sebesar Rp 19.000 untuk sepeda motor. Sehingga penghitungan pajak yang harus dibayar :

Pokok PKB	: Rp 81.000
Sanksi PKB	: Rp 1.625
SW Jasa Raharja	: Rp 22.000
Sanksi Administrasi	: <u>Rp 19.000</u>
Besarnya pajak yang harus dibayar	: Rp 123.625

Berkas-berkas yang digunakan:

- a KTP/Foto copy KTP
- b STNK dan foto copy STNK
- c Foto copy BPKB
- d SPPKB
- e Pembayaran pajak tahun yang lalu

2. Nama pemilik : Waridi / Pujo Warsito

<b>Alamat</b>	<b>: Mudal 7/4 Mudal Boyolali</b>
Merk / type/Jenis	: Honda /C100/Sepeda Motor
Th Pembuatan/Perakitan	: 1996/1996
Isi Silinder/Warna	: 00100CC/HITAM
Nomor Rangka /NIK	: MH1NFG00TTK134294
Nomor Mesin	: NFGE1115110
Nomor BPKB	: 46775351
Usai tanggal STNK	: 18/06/2006
Usai tanggal pajak	: 18/06/2005
Ditetapkan	: 16/06/2005
Dibayar	: 16/06/2005

Wajib pajak diperbolehkan membayar pajak kendaraannya meskipun belum jatuh tempo dan tidak dikenakan tambahan biaya apapun. Sehingga penghitungan pajak yang harus dibayar :

Pokok PKB	: Rp 76.950
SW Jasa Raharja	: <u>Rp 22.000</u>
Besarnya pajak yang harus dibayar	: Rp 98.950

Berkas-berkas yang digunakan:

- a KTP/Foto copy KTP
- b STNK dan foto copy STNK
- c Foto copy BPKB
- d SPPKB



e Pembayaran pajak tahun yang lalu

3. Nama pemilik : Fransiskus Xaverius

**Alamat : Kliwonan RT02/07 Jeron BYL**

Merk / type : ISUZU /TBR52

Jenis /Model : MBRG / PICK-UP

Th Pembuatan/Perakitan : 1991

Isi Silinder/Warna : 02238/BIRU

Nomor Rangka /NIK : M504700

Nomor Mesin : A004700

Nomor BPKB : 98220806

Usai tanggal STNK : 21/05/2007

Usai tanggal pajak : 21/05/2005

Ditetapkan : 16/06/2005

Dibayar : 16/06/2005

Karena terlambat membayar selama 1 (satu) bulan, maka Fransiskus Xaverius

dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % dari pokok PKB dan sanksi

administrasi untuk SW jasa raharja sebesar Rp 70.000 untuk kendaraan

roda empat. Sehingga penghitungan pajak yang harus dibayar :

Pokok PKB : Rp 378.825

Sanksi PKB : Rp 7.500

SW Jasa Raharja : Rp 73.000

Sanksi Administrasi : Rp 70.000

Besarnya pajak yang harus dibayar : Rp 524.325

- KTP/Foto copy KTP
- STNK dan foto copy STNK
- Foto copy BPKB
- SPPKB
- Pembayaran pajak tahun yang lalu

Alamat	: Gatak 2/5 Siswodipuran BYL
Merk / type	: HONDA/GL200 SPORT
Jenis /Model	: SPM / Sepeda Motor
Th Pembuatan/Perakitan	: 1995
Isi Silinder/Warna	: 00200 CC/SILVER MTL
Nomor Rangka /NIK	: MH1SA000SSK011394
Nomor Mesin	: SAE10011388
Nomor BPKB	: 25535691
Usai tanggal STNK	: 14/03/2006
Usai tanggal pajak	: 14/03/2005
Ditetapkan	: 16/06/2005
Dibayar	: 16/06/2005

xliii

Pokok PKB	: Rp 103.950
Sanksi PKB	: Rp 8.325
SW Jasa Raharja	: Rp 22.000
Sanksi Administrasi	: <u>Rp 19.000</u>
Besarnya pajak yang harus dibayar	: Rp 153.275

Berkas-berkas yang digunakan:

- a KTP/Foto copy KTP
- b STNK dan foto copy STNK
- c Foto copy BPKB
- d SPPKB
- e Pembayaran pajak tahun yang lalu

5. Nama pemilik : Yuni Rahmawati

**Alamat** : **Jl. Pemuda 43 RT 2/5**  
**Siswodipuran**

Merk / type : SUZUKI/FD110XCSD  
 Jenis /Model : SPM / Sepeda Motor  
 Th Pembuatan/Perakitan : 2004  
 Isi Silinder/Warna : 00110 CC/BIRU  
 Nomor Rangka /NIK : MH8FD11004857102  
 Nomor Mesin : E4021D571471  
 Nomor BPKB : 3054031-I  
 Usai tanggal STNK : 14/06/2009

Usai tanggal pajak : 14/06/2005  
Ditetapkan : 16/06/2005  
Ditetapkan : 16/06/2005

Karena terlambat membayar, maka Yuni Rahmawati dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % dari pokok PKB meskipun hanya terlambat membayar selama 2 (dua) hari. Dan sanksi administrasi untuk SW jasa raharja sebesar Rp 19.000 untuk Sepeda Motor. Sehingga penghitungan pajak yang harus dibayar :

Pokok PKB	: Rp 105.300
Sanksi PKB	: Rp 2.125
SW Jasa Raharja	: Rp 22.000
Sanksi Administrasi	: <u>Rp 19.000</u>
Besarnya pajak yang harus dibayar	: Rp 129.425

Berkas-berkas yang digunakan:

- a KTP/Foto copy KTP
- b STNK dan foto copy STNK
- c Foto copy BPKB
- d SPPKB
- e Pembayaran pajak tahun yang lalu

Dari sampel wajib pajak yang saya ambil diatas, pelaksanaan pembayaran PKBnya sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur dan proses yang ada.

## **2. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor**

Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dilakukan apabila PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, sehingga menjadi tunggakan dalam masa pajak yang bersangkutan. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor ada 2 (dua) macam yaitu :

a. Tunggakan Kasir.

Adalah tunggakan yang disebabkan karena Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sudah ditetapkan oleh petugas SAMSAT, tetapi belum dibayar oleh pemiliknya. Misalnya: wajib pajak daftar ke SAMSAT dengan syarat-syarat tertentu, berkas-berkasnya sudah mulai diproses termasuk ditetapkan, ternyata uang yang untuk membayar digunakan untuk kepentingan mendadak.

Pada Kantor Bersama SAMSAT Boyolali dibudayakan tunggakan kasir nihil. Wajib pajak langsung membayar PKB yang sudah ditetapkan oleh petugas sekaligus dimuka untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan. Hal ini dapat terlihat dari penetapan selama tahun 2004 pada tabel II.1. berikut :

**TABEL II.1**  
**LAPORAN PENETAPAN PKB DI SAMSAT BOYOLALI**  
**TAHUN 2004**

Jenis Kendaraan	Tunggakan s/d bulan yang lalu	Penetapan		Penetapan s/d bulan ini	Pembayaran bulan ini	Penerimaan bulan ini	Tunggakan s/d bulan ini
		Objek	Rupiah				
A1	-	544	297.320.975	297.320.975	297.320.975	297.320.975	-
A2	-	39	19.699.150	19.699.150	19.699.150	19.699.150	-
B1	-	35	10.636.200	10.636.200	10.636.200	10.636.200	-
B2	-	38	10.384.950	10.384.950	10.384.950	10.384.950	-
C1	-	527	262.950.875	262.950.875	262.950.875	262.950.875	-
C2	-	-	-	-	-	-	-

D	-	1	1.993.700	1.993.700	1.993.700	1.993.700	-
E	-	877	736.055.995	736.055.995	736.055.995	736.055.995	-
<hr/>							
JUM							
LA			1.339.041.84	1.339.041.8	1.339.041.84	1.339.041.84	
H		9.961	5	45	5	5	
<hr/>							

Sumber : Laporan Penetapan Kantor Bersama SAMSAT Boyolali

Keterangan :

A1 = Mobil penumpang bukan umum (sedan, jeep, tesen)

A2 = Mobil penumpang umum (seperti : taksi)

B1 = Microbus plat hitam

B2 = Microbus plat kuning

C1 = Mobil angkutan barang (truck, pick-up) plat hitam

C2 = Mobil angkutan barang plat kuning

D = Alat-alat berat (forklift/traktor, bulldozer, mixer)

E = Sepeda motor

Dari tabel II.1 tersebut di atas dapat diketahui bahwa tidak ada tunggakan kasir pada bulan Desember dan bulan-bulan sebelumnya. Besarnya pembayaran PKB sama dengan besarnya PKB yang telah ditetapkan, sehingga penerimaan PKB pada bulan Desember sama dengan penetapan pada bulan Desember. Dengan demikian tunggakan kasir selama tahun 2004 adalah NIHIL, maka tidak dilakukan tindakan penagihan.

#### b. Tunggakan Penelitian Ulang

Tunggakan penelitian ulang terjadi karena STNK yang sudah habis masa berlakunya, tetapi belum didaftarkan kembali di SAMSAT sampai dengan jatuh tempo pembayaran.

Tunggakan penelitian ulang biasanya terjadi karena hal-hal berikut :

- 1). Kendaraan bermotor rusak berat atau menjadi besi tua.
- 2). Kendaraan bermotor sudah dijual.
- 3). Kendaraan bermotor hilang atau curanmor
- 4). Kendaraan bermotor masih dimiliki, namun tidak dipajakkan.

**TABEL II.2**  
**TUNGGAKAN KENDARAAN BERMOTOR BELUM PU**  
**BULAN MARET 2005**

Jenis Kendaraan	Objek	Tunggakan Rp
Mobil Penumpang (A1)	71	32.228.550
Microbus (B1)	1	211.950
Microbus Umum (B2)	4	783.000
Mobil Beban (C1)	61	22.411.350
Sepeda Motor (E)	896	59.066.550
Jumlah		114.701.400

Sumber : Laporan Tunggakan Belum PU SAMSAT Boyolali

Tunggakan penelitian ulang untuk sepeda motor sebagian besar adalah sepeda motor

baru dari dealer. Jumlah dan sebab-sebab terjadinya tunggakan penelitian

seperti tersebut diatas dapat diketahui dari Surat

Pemberitahuan/Peringatan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor

(SUPERKPKB), yang dikirim oleh kepala UPPD kepada wajib pajak

sebulan sebelum masa pajak atau masa berlaku STNKnya berakhir.

Berdasarkan temuan yang ada pada SUPERKPKB tersebut kemudian

dikelompokkan kasus perkasus dan ditindaklanjuti kegiatan penagihan dengan

serangkaian kebijaksanaan penyelesaian sebagai berikut :

- 1). Kendaraan bermotor yang rusak berat/menjadi besi tua dasarankan agar wajib pajak mengembalikan STNKnya ke POLRI, sehingga yang bersangkutan bebas dari beban membayar PKB serta dapat mengurangi potensi objek tunggakan.

- 2). Terhadap kendaraan bermotor yang sudah dijual, pemiliknya agar membuat laporan tertulis yang memuat tanggal penjualan serta identitas pembelinya. Selanjutnya data kendaraan dimaksud diblokir untuk proses BBNKB
- 3). Untuk kendaraan bermotor yang terlibat curanmor/hilang, disarankan agar pemiliknya melaporkan kepada pihak POLRI, dan berdasarkan laporan kehilangan yang dikeluarkan POLRI pihak Kantor Bersama SAMSAT memblokir data objek kendaraan yang dimaksud
- 4). Terhadap kendaraan bermotor yang masih dimiliki dan kemungkinan mempunyai tunggakan PKB yang cukup besar, agar diberikan penjelasan kepada wajib pajak bahwa atas tunggakan dimaksud dapat diberikan kebijakan pengurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh pengiriman SuperKPKB dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL II.3**  
**LAPORAN PENGIRIMAN SUPER KPKB**  
**BULAN JUNI 2005**  
**KANTOR BERSAMA SAMSAT BOYOLALI**

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	KEC.MUSUK	35
2	KEC. CEPOGO	22
3	KEC. SELO	55
4	KEC. AMPEL	93
5	KEC. BOYOLALI	240
6	KEC. MOJOSONGO	68
7	KEC. TERAS	62
8	KEC. BANYUDONO	49
9	KEC. SAWIT	32
10	KEC. NGEMPLAK	48
11	KEC. NOGOSARI	59
12	KEC. ANDONG	24



13	KEC. KEMUSU	3
14	KEC. JUWANGI	8
15	KEC. WONOSEGORO	4
16	KEC. KARANGGEDE	26
17	KEC. KLEGO	24
18	KEC. SIMO	30
19	KEC. SAMBI	23
JUMLAH		905

Sumber : laporan pengiriman Super KPKB SAMSAT Boyolali

Dari tabel II.3 tersebut dapat diketahui bahwa pada bulan Juni 2005, Kantor Bersama SAMSAT Boyolali telah mengirimkan Super KPKB sebanyak 905 lembar.

Kegiatan penagihan terhadap tunggakan penelitian ulang tersebut, dilakukan untuk mengurangi potensi objek tunggakan, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan PKB.

### **3. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.**

- a. Pembetulan pajak kendaraan bermotor dilakukan terhadap ketetapan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Contoh :

#### **Kesalahan penetapan :**

- 1). Jenis kendaraan : Mobil penumpang
- 2). Fungsi : Bukan umum
- 3). Merk/Type : Toyota Corolla AE 111 M/T
- 4). Tahun/Isi cyl : 1998/1.600 cc
- 5). Nilai Jual : Rp 120.000.000,00

- 6). Bobot : 1,00
- 7). Kuitansi/Faktur : 02 Juni 2002
- 8). Didaftar : 20 Juni 2002
- 9). Ditetapkan : 20 Juni 2002
- 10). Dibayar : 22 Juni 2002

#### **SEHARUSNYA**

- 1). Merk/Type : Toyota Corolla AE 111 A/T
- 2). Tahun/Isi cyl : 1998/1.600 cc
- 3). Nilai Jual : Rp 125.000.000

#### **KETETAPAN PKB**

- 1). Ketetapan PKB Toyota Corolla AE 111 M/T tahun 1998

*Pokok pajak : 1,5 % x Rp 120.000.000 x 1,00 = Rp 1.800.000*

#### ***2). Ketetapan PKB yang seharusnya untuk Toyota Corolla AE 111 A/T tahun 1998***

Pokok pajak : 1,5 % x Rp 125.000.000 x 1,00 = Rp 1.875.000

Apabila kesalahan penetapan terjadi karena kesalahan wajib pajak dalam mengisi SPPKB maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 %. Sehingga wajib pajak diwajibkan membayar kekurangan PKB sebesar :

Pajak kurang bayar	:		=	Rp 75.000
Kenaikan	:	100 % x Rp 75.000	=	<u>Rp 75.000</u>
Jumlah pajak terutang	:		=	Rp150.000

Apabila kesalahan dilakukan oleh petugas, maka kekurangan penetapan PKB tidak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan dan dibebankan kepada petugas.

Pada contoh kasus diatas, kesalahan penetapan dilakukan oleh petugas dalam menetapkan Merk/Type kendaraan. Hal ini disebabkan karena pada faktur kendaraan oleh dialer tidak disebutkan merk/typenya, hanya disebabkan Toyota Corolla. Karena harus segera ditetapkan maka petugas menetapkan dengan merk/type Toyota Corolla AE 111 M/T dengan pertimbangan harganya lebih murah. Dengan demikian karena kesalahan dilakukan oleh petugas, maka kekurangan penetapan PKB dibebankan kepada petugas tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan. Sehingga kewajiban petugas adalah :

Pajak kurang bayar	: Rp 75.000
Kenaikan	: <u>Rp</u> -
Pajak Terutang	: Rp 75.000

Pajak terutang sebesar Rp 75.000 dimasukkan dalam biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Kantor Bersam SAMSAT Boyolali.

- b. Pembatalan pajak kendaraan bermotor dilakukan terhadap penetapan PKB yang tidak benar. Dalam contoh diatas, karena penetapan PKB Toyota Corolla AE 111 M/T salah, maka atas penetapan tersebut dibatalkan dan diganti dengan penetapan yang baru. Dari penetapan yang baru tersebut, apabila terjadi kekurangan pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan apabila terjadi kelebihan

pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

- c. Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak terutang yang terjadi karena keterlambatan wajib pajak dalam membayar PKB dilakukan apabila keterlambatan tersebut terjadi karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

#### **4. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak**

Wajib pajak dengan alasan tertentu dapat mengajukan keringanan dan pembebasan pajak. Atas permohonan wajib pajak dapat diberikan keringanan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor :

- a. Ambulans dan mobil jenazah
- b. Kendaraan bermotor dalam penguasaan atau kepemilikan badan-badan, lembaga-lembaga yang bergerak dibidang keagamaan, sosial, perawatan sakit rokhaniah dan jasmaniah dan dipergunakan semata-mata untuk keperluan dibidang tersebut.

Pembebasan pajak kendaraan bermotor diberikan terhadap kendaraan bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya semata-mata digunakan untuk pemadam kebakaran.

#### **Contoh perhitungan pajak :**

Ambulans jenis Isuzu KAD51S tahun 1988

Nilai Jual : Rp 23.000.000

Pokok pajak :  $1,5 \% \times \text{Rp } 23.000.000 \times 1,00 = \text{Rp } 345.000$

Pajak yang harus dibayar :  $50 \% \times \text{Rp } 345.000$  : Rp 172.500

#### **5. Keberatan dan Banding.**

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan PKB yang terdiri atas pokok dan atau sanksi administrasi yang berupa kenaikan dan bunga selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ketetapan diterima. Pengajuan keberatan harus dilampiri syarat-syarat dan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan antara lain :

- a. Bahwa keterlambatan mendaftar oleh wajib pajak tidak ada faktor kesengajaan.
- b. Wajib pajak kurang memahami tentang ketentuan perundangan yang berlaku.
- c. Apabila pengajuan keberatan menyangkut pokok pajak maka alasan yang dikemukakan harus benar-benar rasional dan mendasar.
- d. Apabila data/keterangan yang diberikan oleh wajib pajak masih diragukan kebenarannya maka kepala UPPD melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor yang bersangkutan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Wajib pajak dapat mengajukan Banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

Pada Kantor Bersama SAMSAT Boyolali pengajuan keberatan dan banding belum pernah dilakukan oleh wajib pajak.

#### **6. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.**

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB yang terdiri dari pokok pajak dan sanksi administrasi secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembayaran pajak dengan syarat-syarat :

- a. Rekomendasi kepala UPPD.
- b. Bukti pembayaran atas penetapan PKB yang diajukan pengembalian.

Kelebihan pembayaran PKB dapat terjadi karena kesalahan penetapan yang menyebabkan pajaknya terlalu tinggi, sehingga atas kelebihan tersebut dapat diajukan restitusi. Apabila terjadi kesalahan penetapan maka kepala UPPD akan memberitahukan kepada wajib pajak dan disarankan untuk mengajukan restitusi. Kesalahan penetapan biasanya terjadi atas kendaraan roda empat baru yang jenisnya bermacam-macam.

Pada Kantor Bersama SAMSAT Boyolali hal ini belum pernah dilakukan, karena kelebihan pembayaran belum pernah terjadi.

#### **7. Kadaluwarsa.**

PKB yang kadaluwarsa ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun kebelakang dan 1 (satu) tahun kedepan dari saat tanggal pendaftaran di Kantor Bersama SAMSAT. Ketetapan PKB selama masa 5 (lima) tahun kebelakang dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan dan bunga tiap tahunnya. Untuk ketetapan PKB 1 (satu) tahun kedepan dihitung sejak tanggal pendaftaran dengan memperhatikan masa pajak (jatuh tempo STNK).

#### **Contoh penetapan kadaluwarsa :**

Masa pajak : 21 Maret 1989

Didaftarkan kembali : 2 Mei 1998

**Perhitungan :**

a.) PKB tahun 1994/1995

Pokok pajak	= Rp 160.000
Kenaikan : 25 % x Rp 160.000	= Rp 40.000
Bunga : $24 \times 2\% \times (\text{Rp}160.000 + \text{Rp}40.000)$	= <u>Rp 96.000</u>
Jumlah	= Rp 296.000

b.) PKB tahun 1995/1996

Pokok pajak	= Rp 160.000
Kenaikan : 25% x Rp 160.000	= Rp 40.000
Bunga : $24 \times 2\% \times (\text{Rp}160.000 + \text{Rp}40.000)$	= <u>Rp 96.000</u>
Jumlah	= Rp 296.000

c.) PKB tahun 1996/1997

Pokok pajak	= Rp 160.000
Kenaikan : 25% x Rp 160.000	= Rp 40.000
Bunga : $24 \times 2\% \times (\text{Rp}160.000 + \text{Rp}40.000)$	= <u>Rp 96.000</u>
Jumlah	= Rp 296.000

d.) PKB tahun 1997/1998

Pokok pajak	= Rp 160.000
Kenaikan : 25% x Rp 160.000	= Rp 40.000
Bunga : $24 \times 2\% \times (\text{Rp}160.000 + \text{Rp}40.000)$	= <u>Rp 96.000</u>
Jumlah	= Rp 296.000

e.) PKB tahun 1998/1999

Pokok pajak	= Rp 160.000
-------------	--------------

$$\begin{aligned} \text{Kenaiakan} &: 25\% \times \text{Rp } 160.000 &= \text{Rp } 40.000 \\ \text{Bunga} &: 13 \times 2\% \times (\text{Rp } 160.000 + \text{Rp } 40.000) &= \underline{\text{Rp } 52.000} \\ \text{Jumlah} &&= \text{Rp } 252.000 \end{aligned}$$

f.) PKB tahun 1999/2000

$$\begin{aligned} \text{Pokok pajak} &&= \text{Rp } 160.000 \\ \text{Kenaiakan} &: 1 \times 2\% \times \text{Rp } 160.000 &= \underline{\text{Rp } 3.200} \\ \text{Jumlah} &&= \text{Rp } 163.000 \end{aligned}$$

Pajak terutang (a + b + c + d + e + f) = Rp 1.303.200

Masa pajak 21 Maret 1998 s/d 21 Maret 1994 sudah kadaluwarsa.

### C. Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor

#### Bersama SAMSAT Boyolali

Analisis efektifitas adalah perbandingan antara hasil pungutan pajak dengan target pajak yang diharapkan (Devas; 1989). Hasil pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan realisasi penerimaan PKB. Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kemampuan maksimum yang dicapai dari penerimaan PKB. Target ini ditentukan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya yang memperhatikan potensi yang ada pada pajak tersebut. Dalam analisis ini penulis menggunakan rumus dari Nick Devas, Brian Brinder, Anne Bouth, Kenneth Davey, Roy Kelly tentang Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Devas, 1989).

Rumus analisis rasio adalah :

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi}}{100\%} \times X$$

Rasio efektifitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali tahun anggaran 2000 s/d 2004 dapat dilihat pada tabel 11.4 berikut :

**TABEL III.4**  
**EFEKTIFITAS PENERIMAAN PKB DI SAMSAT BOYOLALI**  
**TAHUN ANGGARAN 2000 S/D 2004**

Tahun	Target	Realisasi	Rasio efektifitas
2000	Rp2.942.142.000	3.123.293.456	106,16%
2001	Rp5.678.297.000	6.190.479.660	109,02%



2002	Rp7.215.265.000	8.194.376.575	113,57%
2003	Rp9.093.524.000	10.486.652.725	115,32%
2004	Rp11.427.990.000	14.359.269.465	125,65%
Rata- rata			113,94%

Sumber:Laporan Penerimaan PKB Kantor Bersama SAMSAT Boyolali

Dari tabel II.4 tersebut dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas penerimaan PKB di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali tahun 2000 s/d 2004 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata mencapai 113,94 %. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan PKB telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali sudah efektif.

#### **D. Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan Pajak Propinsi yang pengelolaannya diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota. Hasil penerimaan PKB dari Daerah Kabupaten/Kota seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi. Dari keseluruhan hasil penerimaan pungutan PKB tersebut dibagi sebagai berikut :

1. Sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah Propinsi.
2. Sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota

Dari 30 % hasil penerimaan PKB tersebut dibagikan ke masing-masing Kabupaten/Kota dengan pembagian sebagai berikut :

1. Sebesar 60 % (enam puluh persen) berdasarkan potensi dan atau realisasi.
2. Sebesar 40 % (empat puluh persen) secara tertimbang antara lain :
  - a. Luas wilayah
  - b. Jumlah penduduk
  - c. Jumlah penduduk miskin
  - d. Panjang jalan

e. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota tahun yang lalu

Setiap Kabupaten/Kota mendapatkan bagi hasil PKB yang berbeda-beda. Besarnya penerimaan PKB untuk masing-masing Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pos bagi hasil pajak. Untuk menghitung besarnya kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD penulis menggunakan rumus :

Realisasi penerimaan PKB

Kontribusi Penerimaan =

Realisasi Penerimaan PAD

X 100%

Kontribusi Penerimaan PKB terhadap PAD (PAD) di Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2000 s/d 2004 pada pos bagi hasil pajak dapat dilihat pada tabel II.5 berikut :

**TABEL II.5**  
**KONTRIBUSI PENERIMAAN PKB TERHADAP PAD**  
**DI KABUPATEN BOYOLALI PADA POS BAGI HASIL PAJAK**  
**TAHUN 2000 S/D 2004**

Tahun	Realisasi Penerimaan PKB	Realisasi PAD (pada pos bagi hasil)	Kontribusi
	Rp.	Rp.	
2000	560.000.000	7.731.565.667	7,24%
2001	4.173.637.000	16.043.250.195	26,01%
2002	5.539.747.000	20.905.728.730	26,49%
2003	6.445.461.000	10.936.192.242	58,94%
2004	8.041.420.500	12.180.513.560	66,56%
	Rata-rata		37,05%

Sumber : Laporan realisasi APBD Kabupaten Boyolali

Dari tabel II.5 tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2000 s/d 2004 pada pos bagi hasil pajak terus mengalami peningkatan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai pajak bagi hasil, pada tahun 2000 memberikan kontribusi sebesar 7,24 % terhadap PAD, tahun 2001 sebesar 26,01 %, tahun 2002 sebesar 26,49 %, tahun 2003 sebesar 58,94 % dan pada tahun 2004 memberikan kontribusi sebesar 66,56 %. Realisasi penerimaan PKB yang diterima Kabupaten Boyolali selama tahun 2000 s/d 2004 terus mengalami peningkatan. Realisasi PAD pada pos bagi hasil pajak antara tahun 2000 dan 2003 terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena sejak tahun 2003 ada pemisahan antara bagi hasil pajak pusat dan pajak daerah.

Sedangkan kontribusi PKB terhadap PAD Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2000 s/d 2004 dilihat dari total APBD dapat dilihat pada tabel II.6 berikut :

**TABEL II.6**  
**KONTRIBUSI PENERIMAAN PKB TERHADAP APBD**

**DI KABUPATEN BOYOLALI**  
**TAHUN 2000 s/d 2004**

Tahun	Realisasi PKB	Realisasi APBD	Kontribusi
	Rp	Rp	
2000	560.000.000	108.955.441.367	0,51%
	Rp	Rp	
2001	4.173.637.000	279.411.531.393	1,49%
	Rp	Rp	
2002	5.539.747.000	346.827.991.359	1,59%
	Rp	Rp	
2003	6.445.461.000	389.246.882.291	1,66%
	Rp	Rp	
2004	8.041.420.500	403.049.052.311	1,99%
	Rata-rata		1,45 %

Sumber : Laporan realisasi APBD Kabupaten Boyolali

Dari tabel II.6 tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan PKB terhadap APBD Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2000 s/d 2004 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata 1,45%. Pada tahun 2000 penerimaan PKB memberikan kontribusi sebesar 0,51% terhadap APBD, tahun 2001 sebesar 1,49%, tahun 2002 sebesar 1,59%, tahun 2003 sebesar 1,66%, dan pada tahun 2004 memberikan kontribusi sebesar 1,99%. Dari tabel II.6 tersebut juga dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan APBD selama tahun 2000 s/d 2004 juga terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena adanya upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari segala bidang.



### **BAB III**

#### **TEMUAN**

##### **A. Kelebihan**

Dari hasil penelitian ini, penulis dapat menemukan kebaikan–kebaikan antara lain :

1. Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali sudah dilakukan sebagaimana mestinya, sesuai dengan prosedur yang ada.
2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali tahun anggaran 2000 s/d 2004 sudah efektif.
3. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2000 s/d 2004 terus mengalami peningkatan dan rata-rata memberikan kontribusi sebesar 37,05 % terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali pada pos bagi hasil pajak, dan memberikan kontribusi sebesar 1,45 % terhadap APBD.

##### **B. Kelemahan**

Dari penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali, penulis menemukan kelemahan yaitu :

Adanya kesalahan penetapan, yang disebabkan kelalaian petugas dealer dalam penulisan merk atau type kendaraan bermotor pada faktur, maka petugas SAMSAT harus menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan harga kendaraan yang paling murah dari merk/jenis kendaraan tersebut. Karena adanya kesalahan penetapan tersebut petugas harus melakukan pembetulan dan pembatalan penetapan. Apabila kesalahan tersebut mengakibatkan besarnya pajak menjadi kurang bayar maka Kantor Bersama SAMSAT harus mengganti kekurangan pajak tersebut.

## **BAB IV**

### **REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh uraian yang ada, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2000 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang ada. Pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali meliputi :

1. Tata cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Proses pelaksanaan pembayaran PKB dilaksanakan dengan cara :

- a. Wajib pajak datang, menyerahkan berkas-berkas (STNK, foto copy STNK, KTP, foto copy KTP, foto copy BPKB, dan notice pajak tahun yang lalu) ke bagian penyediaan formulir untuk mendapatkan SPPKB. SPPKB ditanda tangani oleh wajib pajak.
- b. Berkas-berkas dan SPPKB diserahkan ke bagian pendaftaran. Wajib pajak membayar RPJK sebesar Rp 5.000 untuk sepeda bermotor dan Rp 10.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih. SPPKB distempel oleh petugas.
- c. Setelah dicatat dalam pembukuan untuk pengesahan setiap tahun, berkas-berkas dan SPPKB diserahkan ke bagian pendataan untuk dilakukan pencocokan data dikomputer dan dokumen tersebut dimasukkan ke dalam map.
- d. Dokumen dalam map diserahkan ke bagian penetapan untuk dihitung besarnya pajak yang harus <sup>55</sup> dibayar. Print out keluar notice pajak, dimasukkan dalam map sesuai dengan berkas/dokumennya, kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi PKB/BBNKB untuk ditanda tangani.
- e. Kemudian diserahkan ke bagian pembayaran dan wajib pajak membayar pajaknya. Notice pajak dimasukkan ke cash register untuk disyahkan.

Berkas-berkas dalam map termasuk notice pajak yang sudah disyahkan diserahkan ke bagian distribusi.

- f. STNK disyahkan oleh petugas. STNK dan notice pajak yang berwarna coklat diserahkan kepada wajib pajak. Sedangkan berkas-berkas yang lain disimpan dalam arsip.

## 2. Penagihan PKB

Penagihan dilakukan terhadap tunggakan PKB. Tunggakan PKB ada 2 (dua) macam yaitu tunggakan kasir dan tunggakan penelitian ulang. Untuk tunggakan kasir di SAMSAT Boyolali nihil. Penagihan untuk tunggakan penelitian ulang dilakukan berdasarkan kasus yang ada pada SuperKPKB.

## 3. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pembetulan dilakukan terhadap ketetapan yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis, hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Pembatalan dilakukan terhadap ketetapan yang tidak benar.

Pengurangan/penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak terutang yang terjadi karena keterlambatan wajib pajak dalam membayar PKB apabila keterlambatan tersebut terjadi karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

## 4. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak.

Atas permohonan wajib pajak dapat diberikan pengurangan dan keringanan pajak sebesar 50 % dari pengenaan PKB bagi kendaraan ambulans



dan mobil jenazah, kendaraan bermotor dalam penguasaan atau kepemilikan badan-badan, lembaga-lembaga yang bergerak dibidang keagamaan dan sosial.

Pembebasan pajak diberikan terhadap kendaraan bermotor yang digunakan untuk pemadam kebakaran.

#### 5. Keberatan dan Banding

Pada Kantor Bersama SAMSAT Boyolali pengajuan keberatan dan banding belum pernah dilakukan.

#### 6. Pengembalian kelebihan pembayaran.

Pada Kantor Bersama SAMSAT Boyolali Pada Kantor Bersama SAMSAT Boyolali Pengembalian kelebihan pembayaran belum pernah dilakukan.

#### 7. Kadaluwarsa.

PKB yang kadaluwarsa ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun kebelakang dan 1 (satu) tahun kedepan dari saat tanggal pendaftaran di Kantor Bersama SAMSAT. Ketetapan PKB selama lima tahun kebelakang dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan dan bunga tiap tahunnya. Untuk ketetapan PKB satu tahun kedepan dihitung sejak tanggal pendaftaran dengan memperhatikan masa pajak (jatuh tempo STNK).

Penerimaan PKB di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali tahun anggaran 2000 s/d 2004 terus mengalami peningkatan dan telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan demikian penerimaan PKB di Kantor Bersama SAMSAT Boyolali sudah efektif. Rasio efektifitas penerimaan PKB di Kantor Bersama SAMSAT pada tahun 2000 sebesar 106,16 %, tahun 2001 sebesar 109,02 %, tahun

2002 sebesar 113,57 %, tahun 2003 sebesar 115,32 % dan pada tahun 2004 sebesar 125,65 %.

Kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD bagi hasil di Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2000 s/d 2004 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 sebesar 7,24 %, tahun 2001 sebesar 26,01 %, tahun 2002 sebesar 26,49 %, tahun 2003 sebesar 58,84 % dan pada tahun 2004 memberikan kontribusi sebesar 66,56 %. Sedangkan kontribusi penerimaan PKB terhadap APBD di Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2000 s/d 2004 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 sebesar 0,51 %, tahun 2001 sebesar 1,49 %, tahun 2002 sebesar 1,59 %, tahun 2003 sebesar 1,66 % dan pada tahun 2004 memberikan kontribusi sebesar 1,99 %.

## **B. Saran**

Dari temuan-temuan yang penulis dapat dari penelitian ini, penulis dapat memberikan saran : bahwa agar tidak terjadi kesalahan penetapan hendaknya petugas dealer berhati-hati dan tidak lalai dalam penulisan atau pengetikan merk/type kendaraan mengingat sekarang ini terdapat berbagai macam jenis kendaraan dengan merk/type yang beraneka ragam. Dengan demikian Petugas SAMSAT dapat menetapkan besarnya PKB dengan benar, dan Kantor Bersama SAMSAT tidak harus menanggung besarnya pajak yang kurang bayar karena telah melakukan kesalahan penetapan. Sebelum menyerahkan faktur ke SAMSAT hendaknya diteliti terlebih dahulu apakah faktur tersebut sudah benar atau belum.



## DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2002 Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2002 Tentang  
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama  
Kendaraan Bermotor

Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang  
Pajak Kendaraan Bermotor

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 Tentang  
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Suandi, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Edisi Pertama. Salemba Empat : Jakarta

# SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : YUNI SUSILOWATI  
Nomor Induk Mahasiswa : F.3402065  
Fakultas : Ekonomi Universitas Sebelas Maret  
Jurusan / Program Studi : D III PERPAJAKAN  
Tempat, tanggal lahir : SUKOHARJO, 4 JUNI 1982  
Alamat rumah / no.telphone : NGUTER RT 03 RW 04 NGUTER SUKOHARJO  
Judul Tugas Akhir : EVALUASI PELAKSANAAN PERDA NO. 3  
TAHUN 2000 TENTANG PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI DI KANTOR BERSAMA SAMSAT  
BOYOLALI  
Pembimbing Tugas Akhir : Dra. EVI GANTYOWATI, M.si, Ak

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1 Tugas Akhir yang saya susun merupakan hasil karya saya sendiri.
  - 2 Apabila ternyata dikemudian hari diketahui bahwa Tugas Akhir yang saya susun tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan / salinan / saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berupa :
    - a. Sebelum dinyatakan LULUS :
      - \* Menyusun ulang Tugas Akhir dan diuji kembali.
    - b. Setelah dinyatakan LULUS :
      - \* Pencabutan gelar dan penarikan ijasah keserjanaan yang telah diperoleh.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 11 JULI 2005

Yang menyatakan,

  
  
YUNI SUSILOWATI  
NIM. F 3402065.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Teratai Nomor 6 Telp. (0276) 321073 Boyolali Kode Pos 57316

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 072/0524/13/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : Drs. M. HASANUDDIN.                          |
| 2. NIP               | : 500 082 421                                  |
| 3. Pangkat/Gol Ruang | : Pembina / IV a.                              |
| 4. Jabatan           | : Kepala Bag. Tata Usaha Dipenda Kab. Boyolali |

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini :

- |              |  |
|--------------|--|
| 1. Nama      | : YUNI SUSILOWATI.   |
| 2. NIM       | : F. 3402065   |
| 3. Pekerjaan | : Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas<br>Maret Surakarta. |
| 4. Alamat    | : Nguter Rt. 03 Rw.04 Sukoharjo                                      |

Berdasarkan Surat Rekomendasi Pemberian Ijin KKN, Riset, Penelitian dan Survey Nomor : 070/116/V/27/2005, tanggal 3 Mei 2005 telah selesai mengadakan penelitian dan Survey pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali dari tanggal 3 Mei 2005 s/d 3 Juni 2005 dengan judul "EVALUASI PELAKSANAAN PERDA NO. 3 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BOYOLALI".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 9 Agustus 2005.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI

Ka. Bag. Tata Usaha  
Kasubag. Umum





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 3 TAHUN 2002  
TENTANG  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu direvisi,

b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut dan menetapkan kembali Pajak Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984X

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685X

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984X

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 42 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686X

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022X



10 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138)

3

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) -
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyicil Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI JAWA **TENGAH**

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah;
2. Kabupaten I Kota adalah Kabupaten I Kota di Propinsi Jawa Tengah,
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu *Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang terdiri dari* ~~set~~**Badan** Eksekutif Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan **Perwakilan** Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi;
5. - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya **diangkat DPIC** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
8. Kendaraan umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
9. Tahun pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan untuk Kendaraan Bermotor yang dirakit di dalam negeri, sedangkan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang dimasukkan secara utuh dan luar negeri berdasarkan pada surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan hukum yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lain-lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,

Frnma, Kongs, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organsasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis. Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya;

11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor,
12. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan dan mendaftarkan kepemilikan dan identitas Kendaraan Bermotor menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, yang berfungsi sebagai Surat Tagihan Pajak Daerah;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar,
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- 16: Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dan pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPON adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa kenaikan dan atau bunga;
19. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
20. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak dan atau Bunga yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat sejenis berdasarkan Peraturan Perpajakan Daerah;
21. Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
22. Penyidikan tindak pidana adalah ' serangkaian tindakan yang - dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
23. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;

24. . Kedaluwarsa adalah suatu alat -untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditejtukan oleh Undang-undang-

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

### Pasal 2

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

### Pasal 3

Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.

### Pasal 4

Dikecualikan sebagai obyek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh

- Pemerintah Pusat. Pemerintah Propinsi. Pemerintah Kabupaten I Kota dan Pemerntah Desa;
- Kedutaan. Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengant asas timbal balik;
- Pabn'kan atau milik importir yang semata-mata tersedia dipamerkan dan dijual,
- Orang pribadi atau Banan yang digunakan semata-mata untuk pemadam kebakaran;
- Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita.

Pasal 5 -

- Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB ada!ah
  - Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan atau ahi warisnya;
  - Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

## BAB III DASAR PENGENAAN, TARIP PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

### Pasal 6

- Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok
  - Nilai Jual Kendaraan Bennotor.
  - Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan . pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor dperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- Dalam hat harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui nilai jualnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor
  - isi silinder dan atau satuan daya;
  - penggunaan Kendaraan Bermotor, c, jenis Kendaraan Bermotor,
  - merk Kendaraan Bermotor;
  - tahun pembuatan Kendaraan Bermotor;
  - ff berat total Kendaraan Bemwtmr dan banyaknya penumpang yang diizinkan;



- (2) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1). disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya
- a 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dan atau kepemilikan untuk Kendaraan Bermotor bare ;
  - b. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak untuk Kendaraan Bermotor bukan bare ;
    - 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor dari luar Daerah.
- (3) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Apabila terjadi perubahan Kendaraan Bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin Wajib Pajak berkewajiban melapor dengan menggunakan SPPKB.

#### Pasal 12

Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 : -

- a. apabila terlambat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak setiap bulan keterlambatan;
- b. apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) dihitung dari pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

#### Pasal 13

(1) SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat

- a. Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan menerima penyerahan;
- b. Tanggal penyerahan; -
  - Dasar penyerahan;
  - Harga Penjualan;
- e. Jenis, Merk, Tipe, Ist cylinder, Tahun Pembuatan, Warna, Bahan Bakar, Nomor Rangka dan Nomor Mesin:

(2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

### BAB VI PENETAPAN PAJAK

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 15

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Gubernur dapat menerbitkan

a. SKPKB dalam hal : -

- 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar,

2) Apabila SPPKB tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;

- 3) Apabila kewajiban mengisi SPPKB tidak dipenuhi, pajak yang \*/ terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam- SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau tertambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan - pajak. yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dan jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

## BAB VU TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

### Pasal 16

- PKB harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
  - (3) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PKB dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan.
  - (4) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak ditetapkan oleh Gubernur.

### Pasal 17

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila
  - a. PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;
  - b. dari hasil penelitian SPPKB terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
- (2) . Jumlah kekurangan PKB yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambahkan : dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan sejak saat terutangnya PKB.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Pajak Terutang dan - ditagih dengan STPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

B A B VIII  
PEMBETUIAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN  
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU  
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak dapat membetui SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tils, kesalahan hitung dan atau kekerruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- (2) Gubernur dapat
- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan per ndang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan keklulafan Wafib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak- yang tidak benar.

**V** Tata cars pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembataran ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

Pasal 20

- (1) . Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB.
- (2) Keringanan PKB dberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) terhadap Kendaraan Bemnotor dalam penguasaan atau kepemilikan oleh badan-badan. lembaga-lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, social, perawatan sakit rokhaniah dan jasmariah dan dipergunakan semata-mata untuk keperluan di bidang tersebut
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X  
**KEBERATAN DAN BANDING \_**

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atas suatu : .
- a SKPD ;
- b. SKPDKB c. SKPDKBT.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dunaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT yang diterima oleh Wajib Pajak, dengan alasan yang jelas kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenu\_hi karena keadaan d luar kekuasaannya.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahkan besarnya PKB yang terutang.
- (4) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) Wan sejak tanggat surat permohonan keberatan sebagaimana dunaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- . (5) Apabila setelah waktu 12 (dua betas) bulan sebagaimana dunaksud pada ayat (4) Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar PKB.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Keputusan tersebut
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar PKB dan pelaksanaan penagihan PKB.

#### Pasal 23

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PKB dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### B A B XI PENGEMBAUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB kepada Gubernur secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya
    - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak ; b. **Masa Pajak** ;
    - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ; d. Alasan yang jelas ; e. Identitas Kendaraan Bermotor.
  - (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah memberikan keputusan.
  - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat. (2) dilampaui Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang PKB lainnya, kelebihan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang PKB dimaksud.
  - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran PKB dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
  - (6) - Apabila pengembalian kelebihan pembayaran PKB dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan PKB untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PKB dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 25

Apabila kelebihan pembayaran PKB diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XII KEDALUWARSA

#### Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan PKB kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutang PKB kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.



(2) Kedaluwarsa penagihan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ; atau
- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

**B A B XI11**  
**UANG PERANGSANG**

**Pasal 27**

Kepada Instansi Pemungut PKB diberikan Uang Perangsang paling tinggi 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan PKB yang disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah.

**B A B XIV**  
**PEMBAGIAN HASIL PAJAK**

**Pasal 28**

(1) Penerimaan hasil pungutan PKB setelah dikurangi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibagi sebagai berikut

- a. Sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah ;
- b. Sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten I Kota.

(2) Pembagian hash sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sebagai berikut

- a. Sebesar 60 % (enam puluh persen) mendaparkan potensi dan atau realisasi ;
- b. Sebesar 40 % (empat puluh persen) secara tertimbang.

(3) Tata cara pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada Mat (2) ditetapkan oleh Gubemur.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasa129**

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana - dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

- a. menerima, mencari, mengumpulkan. dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; .
- b. meneliti, mencan dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokuman lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dolcumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut
- f. meminta bantuan tenaga ahii dalam -angka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). memberitahukan dimutainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 30 - -

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah PKB yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah PKB yang terutang.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Terhadap PKB yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, maka besarnya PKB yang terutang didasarkan pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.

- (2) Terhadap masa PKB yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XVIII - . KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah lanjut oleh Gubernur.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 3 TAHUN 2002  
TENTANG  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Propinsi Daerah Tngkat I Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

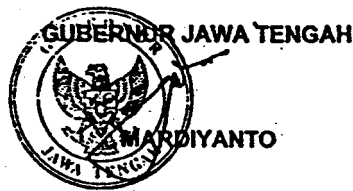
Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah juncties Undang-undang Nomor. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut di atas dan menetapkan kembali Pajak Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 :

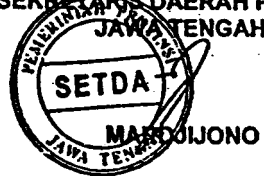
Cukup jelas.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Mei 2002



Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 27 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
JAWA TENGAH



LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 67

